



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**

**RANCANGAN  
RENCANA KERJA TAHUNAN  
( RENJA )  
TAHUN 2022**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MERANGIN**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK**

**KABUPATEN MERANGIN**

Jalan Pemuda Komp. IBRD KM. 2 Bangko

Telp./fax. (0746) 21185

**2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T., karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga dapat tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2022.

Penerbitan buku Rancangan Rencana Kerja ini bertujuan untuk menginformasikan tentang Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2022 dan sekaligus jadwal pelaksanaannya. Selain itu dengan diterbitkan buku ini diharapkan dapat menjadi acuan seluruh staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam penyusunan Rancangan Renja. Selanjutnya kami juga menyadari bahwa Rancangan Renja ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu apapun bentuk saran dan kritik yang disampaikan akan kami terima dengan senang hati guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga penerbitan Rancangan Awal Renja ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang memerlukannya.

Bangko, Maret 2021

**KEPALA DINAS SOSPPPA  
KABUPATEN MERANGIN**

**Drs. JUNAIDI, S.IP, ME**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650608 199001 1 002**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	7
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	12
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	13

### **BAB II HASILEVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH .....	18
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	22
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ERANGKAT DAERAH .....	25
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	27
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ....	28

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	29
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....	30
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	32

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ERANGKAT DAERAH**

4.1 INDIKATOR KINERJA .....	45
4.2 KELOMPOK SASARAN.....	45
4.3 LOKASI KEGIATAN, KEBUTUHAN DANA INDIKATIF, SUMBER DANA.	45

BAB V. PENUTUP.....	46
---------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) sesuai amanat undang undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemerintah daerah dan undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan nasional. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah dan penjabaran dari rencana jangka menengah pemerintah daerah yang lebih dikenal dengan RPJMD. Penjabaran RPJMD harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Strategis ( Renstra). Renstra ini berisi program dan kegiatan serta indikator yang harus dicapai oleh OPD. Untuk menyusun dan mencapai target tersebut maka dibuat Rancangan Rencana Kerja (Renja). Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Forum OPD untuk di tindak lanjuti ke tingkat musyawarah rencana pembangunan ( Musrenbang ) RKPD Tahun 2022, dimana berbagai usulan dari masyarakat dan pemangku kepentingan bersama-sama merencanakan kebijakan program, pendanaan dan target yang ingin dicapai pada Tahun 2022 mendatang.

#### **I.1. LATAR BELAKANG**

Untuk mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kemudian dituangkan dalam Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin menyusun Dokumen Rancangan Renja.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya Rancangan RENJA ini, diharapkan sektor Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Merangin.

#### **1.1.1. Pengertian Renja**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Merangin yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, karena Renja Merupakan pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan/Sub kegiatan di organisasi pemerintah daerah yang pada akhirnya menjadi dasar untuk menyusun program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

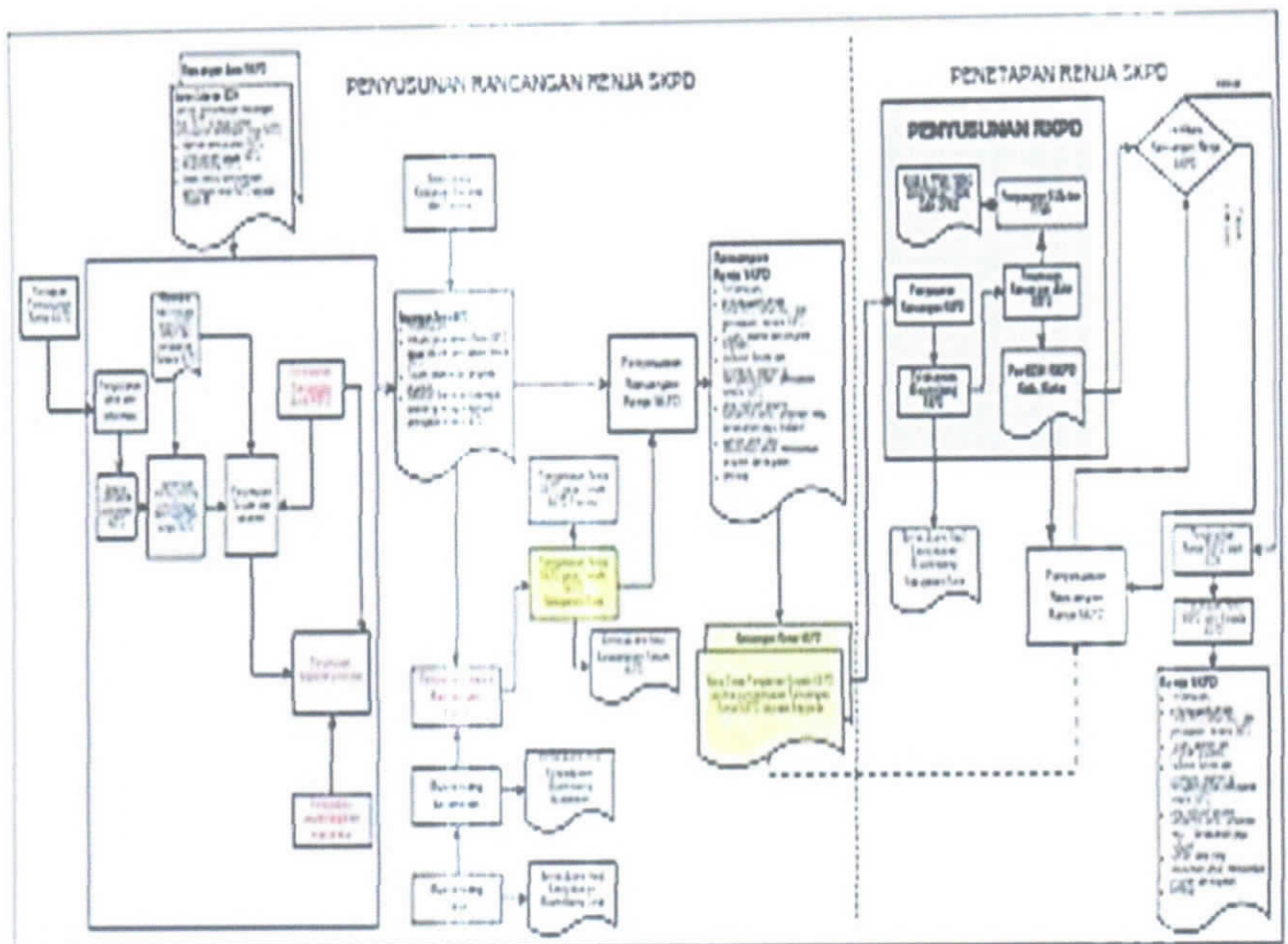
### **1.1.2. Proses Penyusunan Renja**

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan awal Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan/Sub kegiatan prioritas OPD pada tahun rencana anggaran dilaksanakan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.

2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD dengan memperhatikan memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja Dinas SOSPMPA Kabupaten Merangin

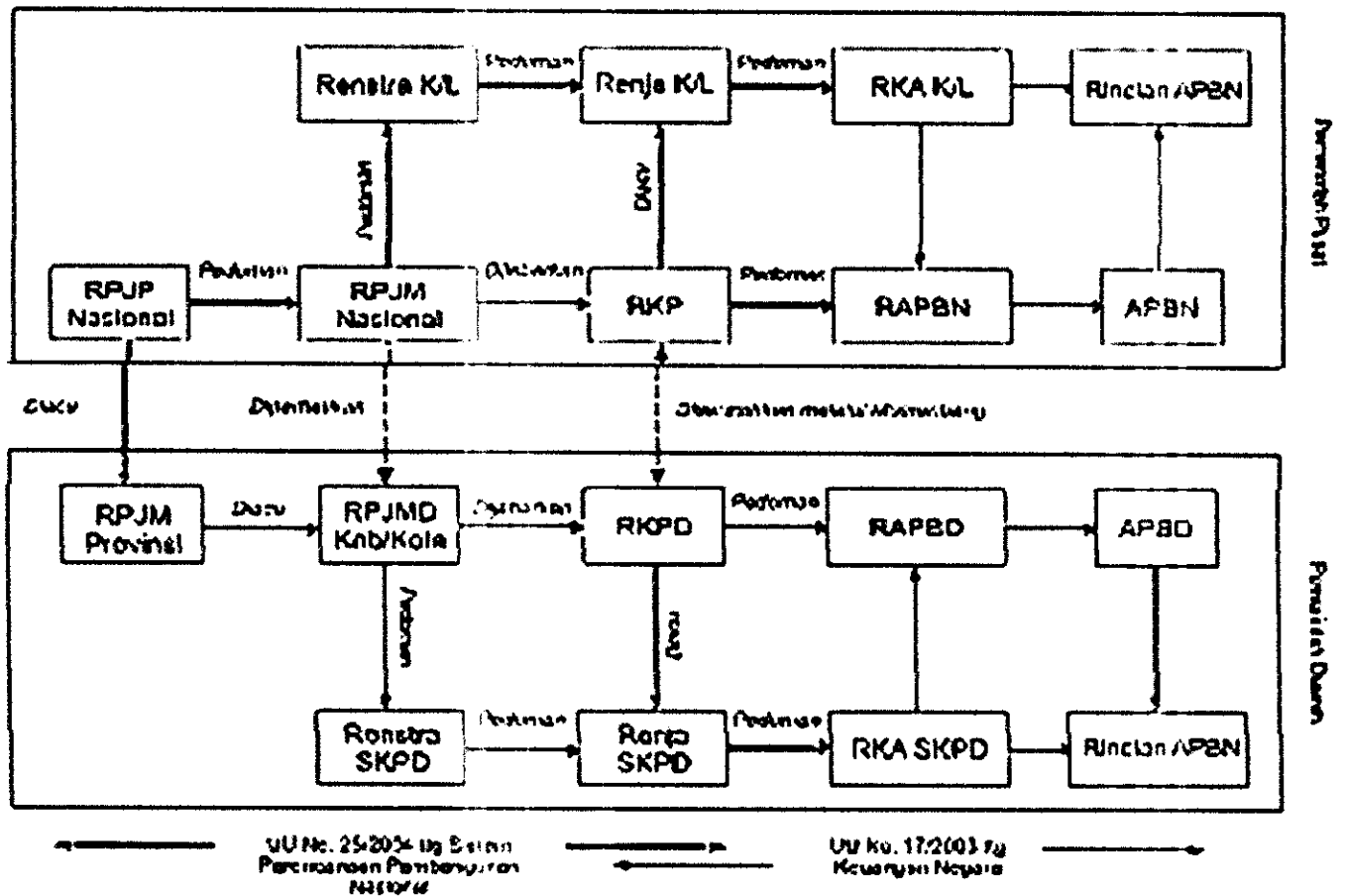
Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja
  - ❖ Pembentukan Tim Penyusun Renja
  - ❖ Orientasi mengenai Renja
  - ❖ Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
  - ❖ Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.
- c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
  - ❖ Pengolahan data dan informasi
  - ❖ Analisis gambaran pelayanan OPD
  - ❖ Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
  - ❖ Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
  - ❖ Telaah terhadap rancangan awal RKPD
  - ❖ Perumusan tujuan dan sasaran
  - ❖ Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
  - ❖ Perumusan kegiatan prioritas
  - ❖ Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
  - ❖ Penyempurnaan rancangan kerja OPD
  - ❖ Pembahasan forum OPD dan
  - ❖ Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja.



Adapun skema hubungan perencanaan dengan penganggaran dibawah ini :

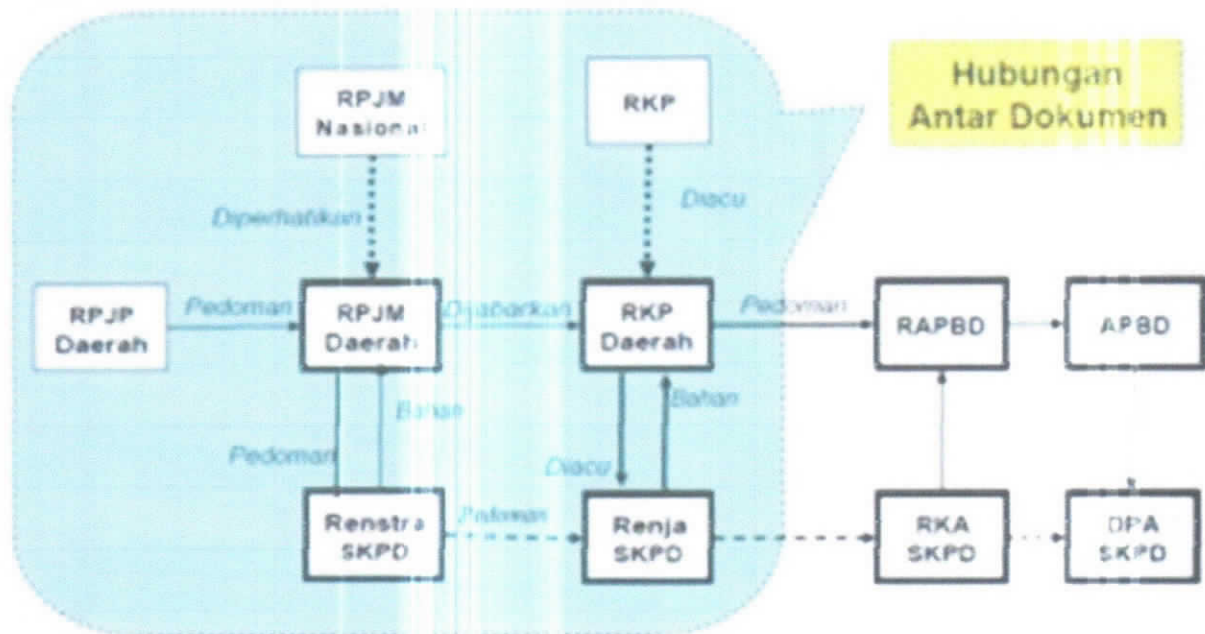


Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

### 1.1.3. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan

jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3 Bagan hubungan antar dokumen perencanaan daerah

## I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung

- Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)
  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  4. Undang-Undang No 1 Tahun 2000 Tentang pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Sebagaiman Diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang

- Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016

- Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2015 - 2019 ;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Daerah;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
35. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang standar Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota;
36. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016–2021;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
41. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 38)
42. Kepmendagri 050-3078 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan Keuangan Daerah;

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tentang program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022, sedangkan tujuannya adalah :

1. Acuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Merangin tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Merangin.
2. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin
3. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin selama tahun 2022.

### **I.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja DINAS SOSPPPA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1 Latar Belakang**

Memuat tentang pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja



K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindaklanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam Penyusunan dan penganggaran Perangkat daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Mengambarkan Outline penulisan Renja Dinas social,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Menjelaskan tentang muatan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2020) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2021), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Dalam bab 2.1 juga memuat tentang pencapaian target Renstra dinas sosial,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja dinas sosial,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin tahun-tahun sebelumnya.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

## **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berisikan uraian mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Se jauh mana tingkat kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs ( Sustainable Development Goals);
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisikan Uraian Mengenai :

- Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: merdapat mumusan program dan

kegiatan/sub kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan/sub kegiatan cocok Namun besarnya berbeda.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada sub ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, Lsm, Asosiasi-Asosiasi, Perguruan Tinggi Maupun Dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Langsung Ditujukan Kepada Perangkat Daerah Provinsi Maupun Berdasarkan Hasil Pengumpulan Informasi Perangkat Daerah Provinsi Dari Penelitian Lapangan dan Pengamatan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang sinergisitas arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan di dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin.
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan di DINSOSPPPA.
- Penjelasan rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indilatif, maupun kombinasi keduanya.
- Rencana Program dan Kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan di dinas sosial,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin tahun 2022

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Menguraikan tentang Indikator Kinerja, Kelompok sasaran serta lokasi kegiatan dan kebutuhan dana indikatof dinas sosial,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin.

## **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang isu rekomondasi terhadap pencapaian kinerja OPD dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik dalam rangka strategi pelaksanaannya maupun ketersediaan dan kemampuan anggaran,serta kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan tahun 2022.

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2=2022-2=2020) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
  - Tidak Ada
2. Realisasi Program /Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

No	PROGRAM	TARGET	REALISASI
1.	Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	66,67%	66,67 %
2.	Program Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )	42,27 %	43,53%
3.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	80 %	100 %

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

No	PROGRAM	TARGET	REALISASI
1.	Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	66,67%	66,67 %
2.	Program Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )	42,27 %	43,53%
3.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	80 %	100 %

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian indikator dan sasaran Program Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :
- Terbantunya masyarakat yang terkena musibah baik bencana alam maupun bencana sosial lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar
  - Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Suku Anak Dalam untuk berwirausaha
  - Terbantunya anak terlantar, jompo terlantar serta penyandang cacat serta penyandang penyakit sosial lainnya dalam mendapatkan akses layanan rehabilitasi sosial.
  - Meningkatnya kualitas data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Merangin.
  - Meningkatnya akses layanan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial
  - Meningkatnya kualitas layanan penanganan kekerasan perempuan dan anak melalui Ruman Perlindungan.

g. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender ( IPG ) dan Indeks Pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten Merangin.

5. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor – factor penyebab .

Adapun kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang ditempuh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam mengatasi factor – factor penyebab Implikasi capaian indicator Program dan Sasaran Program adalah :

1. Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, melalui :
  - a. Pemberian Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat miskin.
  - b. Peningkatan Kualitas Pelayanan berbagai penyandang masalah sosial
  - c. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Anak Terlantar, Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta Korban Bencana.
  - d. Peningkatan kualitas data PMKS setiap tahun serta
  - e. Pemberdayaan Ekonomi bagi warga KAT.
2. Meningkatkan peran lembaga sosial, organisasi sosial kemasyarakatan lainnya guna mendorong pemberdayaan lembaga sosial sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial, melalui :
  - a. Mendayagunakan LKS untuk mampu meningkatkan kesejahteraan sosial
  - b. Meningkatkan profesionalitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) melalui pendidikan dan pelatihan.
  - c. Memberikan kemudahan dan akses pembentukan wadah penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  - d. Meningkatkan peran organisasi sosial guna mendorong pemberdayaan Lembaga Sosial sebagai potensi kesejahteraan sosial.

- e. Meningkatkan pembinaan bagi veteran dan keluarganya
- 3. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, melalui :
  - a. Peningkatan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif
  - b. Melakukan sosialisasi perlindungan tenaga kerja perempuan serta pencatatan dan pelaporan KDRT
  - c. Penyiapan Peraturan Daerah tentang peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan
  - d. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan dasar kesehatan dan pendidikan yang ramah anak
  - e. Memfasilitasi pembentukan forum anak daerah dan pembinaan
  - f. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak
  - g. Melakukan sosialisasi perlindungan anak.
  - h. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender
  - i. Pembentukan kelembagaan PUG, Peningkatan kapasitas pokja PUG, Tim Teknis PUG, Pokal Point dalam PPRG, Pelatihan penyusunan PPRG dan pendampingan pelaksanaan PPRG
  - j. Peningkatan kapasitas bagi organisasi perempuan
  - k. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan termasuk pelatihan, pendidikan politik perempuan dan penyiapan kader politik perempuan.
  - l. Peningkatan wawasan bagi kaum perempuan dalam mengelola usaha serta mempublikasikan hasil karya perempuan



Untuk melihat rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah tampak pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel T-C.29  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian  
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program ( Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan dengan Tahun (2019)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2018)					Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2020)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 20120	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11	12	13= (5+7+9)	14= (10/4)		
1.06.1.06	Urusan wajib Pelayanan Dasar Sosial														
1.06.1.06.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	97	%	96	%	96,50	%	96,50	%	100	96,50	%		
1.06.1.06.1.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang terselesaikan	165	Surat	155	Surat	160	Surat	160	Surat	100	160	Surat	475	288
1.06.1.06.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	300
1.06.1.06.1.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Terlunasi Pajaknya	17	Unit	15	Unit	17	Unit	17	Unit	100	17	Unit	49	288
1.06.1.06.1.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Administrasi Keuangan DINSOSPPPA yang Disediakan	12	Bulan	9	Orang	12	Orang	12	Orang	100	12	Bulan	33	275
1.06.1.06.1.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Peralatan Kebersihan Kantor yang Disediakan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	300
1.06.1.06.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	alat Tulis Kantor yang Disediakan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	300
1.06.1.06.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	14	Jenis	10	Jenis	12	Jenis	12	Jenis	100	12	Jenis	34	243
1.06.1.06.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang Disediakan	14	Jenis	10	Jenis	12	Jenis	12	Jenis	100	12	Jenis	34	243
1.06.1.06.1.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan jasa publikasi	Jumlah Bacaan dan Publikasi yang Disediakan	33	Media Massa	31	Media Massa	32	Media Massa	32	Media Massa	0	32	Media Massa	95	288
1.06.1.06.1.01.17	Penyediaan makan dan minum	Makan dan Minum Harian Pegawai/ Rapat/ Lembur/ Tamu yang disediakan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	36	300
1.06.1.06.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	82	Kali	76	kali	81	kali	81	kali	100	81	Kali	238	290
1.06.1.06.1.01.19	Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis perkantoran	umlah Tenaga pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran	28	Orang	28	orang	28	orang	28	orang	100	28	Orang	84	300
1.06.1.06.1.01.20	Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah	Frekuensi Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan dalam Daerah yang dilaksanakan	62	Kali	1	Tahun	61	Tahun	61	Tahun	100	61	Kali	123	198
1.06.1.06.1.01.25	Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan non PNS	Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS	28	Orang	28	Orang	28	Orang	28	Orang	0	28	Orang	84	300
1.06.1.06.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	93	%	92	%	92,50	%	92,50	%	100	92,50	%		
1.06.1.06.1.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	1	Unit	0	0	1	Unit	1	unit	100	1	Unit	2	200
1.06.1.06.1.02.07	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	12	Unit	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0	3	Unit	4	33,33333333
1.06.1.06.1.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di pelihara	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	1	Unit	3	300
1.06.1.06.1.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara	7	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	100	7	Unit	19	271
1.06.1.06.1.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/ kerja	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	10	Unit	0	0	9	unit	9	unit	100	9	Unit	18	180
1.06.1.06.1.02.32	Penyediaan asuransi kendaraan bermotor	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional yang diasuransikan	17	Unit	8	Unit	11	Unit	0	Unit	0	17	Unit	25	147
1.06.1.06.1.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehab Gedung Kantor yang direhab	1	Unit	0	0	0	0	0	0	0	1	Unit	0	0
1.06.1.06.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana disiplin ASN	96	%	95	%	95,50	%	0	%	0	95,50	%		
1.06.1.06.1.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus yang diadakan	33	Stel	31	Stel	33	Stel	0	Stel	0	33	Stel	64	194
1.06.1.06.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Perencana yang Mengikuti Pelatihan	42	%			41,50	%	0	%	0	41,50	%		
1.06.1.06.1.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek	14	Orang	0	Orang	8	Orang	0	Orang	0	13	Orang	13	93

1.06.1.06.1.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Aklip OPD	68		BB		67		67		67				
1.06.1.06.1.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah Laporan Kinerja OPD yang disusun	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	60
1.06.1.06.1.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Jumlah Laporan Keuangan OPD yang disusun	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	6	60
1.06.1.06.1.06.05	Penyusunan Laporan Tahunan OPD	Jumlah Laporan Tahunan OPD yang disusun	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	60
1.06.1.06.1.06.06	Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD	Jumlah Laporan Aset yang disusun	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	4	80
1.06.1.06.1.07	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan Oleh BPK/Inspektorat	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%		
1.06.1.06.1.07.01	Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Laporan Pengendalian Intern Pemerintah	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	60
1.06.1.06.1.11	Program Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD	96	%	98	%	95,50	%	95,50	%	100	95,50	%		
1.06.1.06.1.11.02	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja yang disusun	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	60
1.06.1.06.1.11.04	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran yang disusun	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	6	60
1.06.1.06.1.11.05	Penyusunan indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD	Dokumen IKU dan PK OPD yang disusun	5	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	1	Dokumen	4	80
1.06.1.06.1.15	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	75,00	%	-	-	66,67	%	66,67	%	100	66,67	%	-	-
1.06.1.06.1.15.06	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang diberdayakan	4	PSKS	1	psks	1	PSKS	1	PSKS	100	1	PSKS	3	75
1.06.1.06.1.16	Program Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	42,45	%	19,99	%	42,27	%	42,27	%	100	42,27	%	-	-
1.06.1.06.1.16.04	Fasilitasi, Perlindungan dan jaminan sosial masyarakat miskin	Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	200	KPM	200	KPM	200	KPM	200	KPM	100	200	KPM	600	300
1.06.1.06.1.16.09	Pemberdayaan Suku Anak Dalam	Jumlah Kelompok SAD yang diberdayakan	1	Kelompok	0	0	1	Kelompok	1	Kelompok	100	1	Kelompok	2	200
1.06.1.06.1.16.10	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana pada tanggap darurat	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	500	Orang	37	Orang	500	Orang	39	Orang	7,8	500	Orang	576	115
1.06.1.06.1.16.12	Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Basis Data PMKS	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	300
1.06.1.06.1.16.19	Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi penyandang masalah sosial	Jumlah Penyandang Masalah Sosial yang Mendapatkan Pelayanan dan pemenuhan Kebutuhan Dasar	132	Orang	20	Orang	132	Orang	132	Orang	100	132	Orang	284	215
2	Urusan wajib Bukan Pelayanan Dasar														
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
2.02.1.06.1.15	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Tertangan	82	%	-	-	80	%	80	%	100	80	%	-	-
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,61	%	-	-	54,41	%	54,41	%	100	54,41	%	-	-
2.02.1.06.1.15.04	Fasilitasi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A)	Jumlah Kasus yang dilayani	50	Kasus	43	Kasus	50	Kasus	35	Kasus	70	50	Kasus	128	256
2.02.1.06.1.15.05	Advokasi dan fasilitasi kelembagaan PUG	Jumlah Kelembagaan PUG yang Aktif	1	PUG	1	PUG	1	PUG	1	PUG	0	1	PUG	3	300
2.02.1.06.1.15.07	Pengembangan Pusat Informasi Gender dan Anak	Data terpilah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	300
2.02.1.06.1.15.09	Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	Tingkat Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak		Nindya	1	KLA	1	KLA	1	KLA	100		Madya	Persiapan	Persiapan

Bangka, Desember 2021

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak



Dr. ELVIS SURYADINAT  
NIP. 19640506 199303 1 003

## II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin berkewajiban untuk melaksanakan SPM sesuai target yang sudah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2019 - 2023.

Ditinjau dari segi hukum SPM bidang sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dapat bersifat "*beziking*" yaitu penetapan materi yang telah diatur oleh payung hukum yang lebih tinggi, namun bersifat juga "*regeling*" yaitu pengaturan materi dapat ditambahkan sesuai kemampuan pihak yang mendapat materi pengaturan. SPM bidang sosial merupakan penjabaran dari target yang telah dipandu oleh Kementerian Sosial.

Berdasarkan kajian diatas terdapat beberapa capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sampai dengan posisi 31 Desember 2020 sebagai berikut :

- A. Kinerja Pelayanan berdasarkan Indikator Program dan Kegiatan bidang Sosial, sebagai berikut :
  1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasar dengan Target sebanyak 42,27 %.
  2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan untuk Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dengan Target sebanyak 66,67% .
- B. Kinerja Pelayanan berdasarkan Indikator Program dan Kegiatan Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai berikut :

1. Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang tertangani dengan target 80%.
  2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan target 54,41% pada Tahun
- C. Kinerja pelayanan berdasarkan indikator SPM, sebagai berikut :
1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan target sebanyak 19,23 % atau setara dengan 10 Orang pada Tahun 2020.
  2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan target sebanyak 20% atau setara dengan 20 Orang pada Tahun 2020
  3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan target sebanyak 20% atau setara dengan 100 Orang pada Tahun 2020.
  4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan target sebanyak 20% atau setara dengan 2 Orang pada Tahun 2020.
  5. Persentase korban bencana cakupan penanganan skala Kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat dengan target sebanyak 20% atau setara dengan 500 Orang pada tahun 2020.

Secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tampak pada tabel 2.2 dibawah ini :

Indikator	Data Awal	Capaian 2019		Target 2020		Capaian 2020	
		JLH	%	Jlh	%		
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas Terlantar di luar panti :							
❖ Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	52 Orang	45 Orang	450	10 Orang	19,23 %	10 Orang	100%
2. Rehabilitasi sosial dasar							

anak terlantar luar panti : ❖ Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 Orang	20 Orang	100	20 Orang	20%	0	0%
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di Luar Panti : ❖ Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	500 Orang	893 Orang	893%	100 Orang	20%	507 Orang	500%
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti :  ❖ Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	10 Orang	-	0%	2 Orang	20%	0 Orang	0%
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota :  ❖ Persentase korban bencana cakupan penanganan skala Kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat	2.500 Orang	37 Orang	7,4%	500 Orang	20%	39 Orang	7,8%

### **II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :
  - 1) Belum optimalnya kapasitas SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
  - 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.
  - 3) Belum akuratnya data fakir miskin di Kabupaten Merangin.
  - 4) Masih tingginya korban bencana alam, baik yang diakibatkan oleh peristiwa alam maupun ulah manusia
  - 5) Belum optimalnya pemberdayaan suku anak dalam
  - 6) Belum semua Perangkat Daerah di kabupaten merangin yang melaksanakan PPRG
  - 7) Masih rendahnya Partisipasi Perempuan dalam legislatif, Tahun 2020 Jumlah perempuan anggota legeslatif sebanyak 1 Orang.
  - 8) Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
  - 9) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
  - 10) Belum semua korban kekerasan mendapatkan penanganan yang optimal
  - 11) Belum tersedianya sistem data terpadu perempuan dan anak
  - 12) Masih kurangnya peran forum anak daerah
  - 13) Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kab/Kota, yang disebabkan oleh :
    - Ketersediaan Anggaran yang masih kurang

a. Peluang

Adapun Peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diuraikan sebagai berikut :

- ❖ Tersedianya Rumah Aman dan Mobil Perlindungan
- ❖ Sosialisasi Tentang Konsep Gender dan Perlindungan Anak pada Masyarakat
- ❖ Tersedianya TKSK, Pendamping PKH, Pekerja Sosial Profesional, TAGANA, PSM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial
- ❖ Kebijakan Penanganan penanggulangan kemiskinan merupakan Program Prioritas Nasional yang wajib untuk dilaksanakan bagi Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- ❖ Kebijakan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) telah tertuang dalam RPJMD
- ❖ Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana salah satu urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah ***Bidang Sosial***
- ❖ Adanya Peraturan Menteri Sosial RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta
- ❖ Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- ❖ Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah
- ❖ Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak
- ❖ Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat



dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- ❖ Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

3. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain :

<b>NO</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>
1.	Menurunkan Jumlah PMKS	Program pembinaan, pemberdayaan, rehabilitasi, bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ).	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar
		Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang Diberdayakan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial
2.	Meningkatkan Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang tertangani
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

. Adapun isu strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Belum optimalnya Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial (Kessos).
3. Masih Rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
4. Belum Tercapainya Kabupaten/Kota Layak Anak.

#### **II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang sosial maupun bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk setiap tahun anggaran .
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat ( prosesdur Batten up ).
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif khususnya dan masyarakat pada umumnya sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Secara rinci review terhadap Rancangan RKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2022 tampak pada tabel 2.3 dibawah ini : (Lampiran)

Tabel 2.3  
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN Akhir RKPd TAHUN 2022  
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Hasil Akhir Kebijakan					BOPD Penunjang Daerah
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebijakan Dasar / Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		Kab. Merangin				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		Kab. Merangin			Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1 06 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat keluar perangkat daerah	Kab. Merangin	170 Surat	1.202.500	APBD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat keluar perangkat daerah	Kab. Merangin	170 Surat	1.202.500	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1 06 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Merangin	12 Bulan	78.815.900	APBD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Merangin	12 Bulan	78.815.900	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1 06 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makan dan Minum yang disediakan	Kab. Merangin	12 bulan	19.914.000	APBD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makan dan Minum yang disediakan	Kab. Merangin	12 Bulan	19.914.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1 06 01 2,06 1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat/kelengkapan listrik dan elektronik perangkat daerah yang disediakan	Kab. Merangin	16 Jenis	10.000.000	APBD	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat/kelengkapan listrik dan elektronik perangkat daerah yang disediakan	Kab. Merangin	16 Jenis	10.000.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1 06 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Merangin	0 Unit	-	APBD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Merangin	0 Unit	-	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1 06 01 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik yang disediakan	Kab. Merangin	12 Bulan	70.000.000	APBD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik yang disediakan	Kab. Merangin	12 Bulan	70.000.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1 06 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan perangkat daerah yang disediakan	Kab. Merangin	16 Eks	27.200.000	APBD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan perangkat daerah yang disediakan	Kab. Merangin	16 Eks	27.200.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1 06 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kab. Merangin	31 Media Massa	50.000.000	APBD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kab. Merangin	31 Media Massa	50.000.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1 06 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi perjalanan dinas keluar ke luar daerah	Kab. Merangin	83 Kali	321.513.300	APBD	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi perjalanan dinas keluar ke luar daerah	Kab. Merangin	83 Kali	300.765.800	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1 06 01 2,07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kendaraan dinas/operasional perangkat daerah yang diadakan	Kab. Merangin	2 Unit		APBD	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kendaraan dinas/operasional perangkat daerah yang diadakan	Kab. Merangin	2 Unit		Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1 06 01 2,07 05	Pengadaan Mebel	Mebeler perangkat Daerah yang diadakan	Kab. Merangin	17 Unit		APBD	Pengadaan Mebel	Mebeler perangkat Daerah yang diadakan	Kab. Merangin	17 Unit		Dinas SOSPPA Kab. Merangin

1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Peralatan gedung kantor yang disediakan	Kab. Merangin	10 Unit		APBD	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Peralatan gedung kantor yang disediakan	Kab. Merangin	10 Unit		
1	06	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan bangunan gedung kantor lainnya yang dibangun	Kab. Merangin	1 Unit		APBD	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan bangunan gedung kantor lainnya yang dibangun	Kab. Merangin	1 Unit		
1	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang disediakan	Kab. Merangin	8 Unit	16.000.000	APBD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang disediakan	Kab. Merangin	8 Unit	16.000.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	Kab. Merangin	18 Unit	179.989.500	APBD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	Kab. Merangin	18 Unit	179.989.500	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Ruang Gedung Kantor yang dipelihara	Kab. Merangin	1 Unit	40.000.000	APBD	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Ruang Gedung Kantor yang dipelihara	Kab. Merangin	1 Unit	40.000.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Merangin	38 Unit	19.985.000	APBD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Merangin	38 Unit	19.985.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga serta Atributnya yang disediakan	Kab. Merangin	92 Stel	63.625.000	APBD	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga serta Atributnya yang disediakan	Kab. Merangin	92 Stel	63.625.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN yang mengikuti Bimtek	Kab. Merangin	3 Orang	17.445.000	APBD	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN yang mengikuti Bimtek	Kab. Merangin	3 Orang	17.445.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Merangin	12 Bulan	3.761.081.250	APBD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Merangin	12 Bulan	3.761.081.250	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi Keuangan Dinsosppa yang disediakan	Kab. Merangin	12 Bulan	148.320.000	APBD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi Keuangan Dinsosppa yang disediakan	Kab. Merangin	12 Bulan	148.320.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Merangin	1 Dok	7.568.000	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Merangin	1 Dok	7.568.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen pelaporan keuangan semesteran PD	Kab. Merangin	1 Dok	7.568.100	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen pelaporan keuangan semesteran PD	Kab. Merangin	1 Dok	7.568.100	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	- Dokumen renstra - Dokumen renja	Kab. Merangin	5 Dok	20.000.000	APBD	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	- Dokumen renstra - Dokumen renja	Kab. Merangin	5 Dok	20.000.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen perencanaan RKA dan RKAP	Kab. Merangin	2 Dok	8.325.000	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen perencanaan RKA dan RKAP	Kab. Merangin	2 Dok	8.325.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin

1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dokumen DPA dan DPA Perubahan	Kab. Merangin	2 Dok	8.325.000	APBD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dokumen DPA dan DPA Perubahan	Kab. Merangin	2 Dok	8.325.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD (LKJ), laporan Tahunan, IKU & PK, dan Standar Penilaian Sistem	Kab. Merangin	5 Dok	80.000.000	APBD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD (LKJ), laporan Tahunan, IKU & PK, dan Standar Penilaian Sistem	Kab. Merangin	5 Dok	80.000.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	penataan aset SKPD Dinas SOSPPPA	Kab. Merangin	1 Dok	19.363.000	APBD	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	penataan aset SKPD Dinas SOSPPPA	Kab. Merangin	1 Dok	19.363.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Merangin	132 Orang	131.862.000	APBD	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Merangin	132 Orang	131.862.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemakanan	Kab. Merangin	132 Orang	31.274.500	APBD	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemakanan	Kab. Merangin	132 Orang	31.274.500	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan sandang	Kab. Merangin	132 Orang	30.163.000	APBD	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan sandang	Kab. Merangin	132 Orang	30.163.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan alat bantu	Kab. Merangin	60 Orang	41.060.500	APBD	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan alat bantu	Kab. Merangin	60 Orang	41.060.500	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Bimbingan Sosial	Kab. Merangin	132 Orang	29.364.000	APBD	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Bimbingan Sosial	Kab. Merangin	132 Orang	29.364.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Kab. Merangin	140 Orang	172.851.000	APBD	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Kab. Merangin	140 Orang	172.851.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.02	14	Kerjasama Antar Lembaga dan Komite dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Kab. Merangin	140 Orang	172.851.000	APBD	Kerjasama Antar Lembaga dan Komite dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Kab. Merangin	140 Orang	172.851.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan sosial daerah Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	500 Orang	76.967.300	APBD	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan sosial daerah Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	500 Orang	76.967.300	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Alam yang mendapatkan makanan	Kab. Merangin	500 Orang	43.262.500	APBD	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Alam yang mendapatkan makanan	Kab. Merangin	500 Orang	43.262.500	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana Alam yang mendapatkan Sandang	Kab. Merangin	500 Orang	-	APBD	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana Alam yang mendapatkan Sandang	Kab. Merangin	500 Orang	-	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Korban Bencana Alam yang mendapatkan tempat penampungan	Kab. Merangin	500 Orang	33.704.800	APBD	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Korban Bencana Alam yang mendapatkan tempat penampungan	Kab. Merangin	500 Orang	33.704.800	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas data base kemiskinan	Kab. Merangin	1 Dok	200.846.800	APBD	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas data base kemiskinan	Kab. Merangin	1 Dok	200.846.800	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kemiskinan yang terupdate setiap tahun	Kab. Merangin	1 Dok	147.632.700	APBD	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kemiskinan yang terupdate setiap tahun	Kab. Merangin	1 Dok	147.632.700	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	05	2.02	03	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Prekuensi fasilitas masyarakat miskin dalam mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Kab. Merangin	1 Kali	53.214.100	APBD	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Prekuensi fasilitas masyarakat miskin dalam mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Kab. Merangin	1 Kali	53.214.100	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin

06	02	2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial secara tepat	6 Penyelenggara	32.347.500	APBD	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial secara tepat	6 Penyelenggara	32.347.500	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
06	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Penyelenggara UGB dan PUB yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	6 Penyelenggara	32.347.500	APBD	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Penyelenggara UGB dan PUB yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	6 Penyelenggara	32.347.500	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
06	02	03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	4 PSKS	66.574.500	APBD	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	4 PSKS	66.574.500	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
06	02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Frekuensi Pelatihan PSM	1 Kali		APBD	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Frekuensi Pelatihan PSM	1 Kali		Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
06	02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Frekuensi Pelatihan TIKSK	1 kali	16.435.500	APBD	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Frekuensi Pelatihan TIKSK	1 kali	16.435.500	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
06	02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Frekuensi Pelatihan PSKS Kelembagaan Masyarakat	3 Kali	50.139.000	APBD	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Frekuensi Pelatihan PSKS Kelembagaan Masyarakat	3 Kali	50.139.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
06	02	01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Meningkatkan Kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar	1 Kelompok	57.442.000	APBD	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Meningkatkan Kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar	1 Kelompok	57.442.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
06	02	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah KAT yang mendapatkan pemberdayaan	1 Kelompok	57.442.000	APBD	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah KAT yang mendapatkan pemberdayaan	1 Kelompok	57.442.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin

1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Taman Makam Pahlawan Pahlriot Bangko		1 Lokasi	36.442.000	APBD	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Taman Makam Pahlawan Pahlriot Bangko	1 Lokasi	36.442.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 Lokasi	36.442.000	APBD	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 Lokasi	36.442.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Perlindungan Perempuan yang ditingkatkan	21 Lembaga	140.000.000	APBD	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Perlindungan Perempuan yang ditingkatkan	21 Lembaga	140.000.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Layanan Bagi Korban Kekerasan yang disediakan	1 Unit	140.000.000	APBD	Advokasi Kebijakan dan Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Layanan Bagi Korban Kekerasan yang disediakan	1 Unit	140.000.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TOT yang dilaksanakan	2 Kali	-	APBD	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TOT yang dilaksanakan	2 Kali	-	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Bantuan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus yang mendapatkan layanan	60 Orang	-	APBD	Penyediaan Bantuan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus yang mendapatkan layanan	60 Orang	-	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang terbentuk	5 Lembaga	-	APBD	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang terbentuk	5 Lembaga	-	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kelembagaan PUG	45 PUG	50.000.000	APBD	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kelembagaan PUG	45 PUG	50.000.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah kelembagaan PUG yang aktif	45 PUG	50.000.000	APBD	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah kelembagaan PUG yang aktif	45 PUG	50.000.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100 Orang	46.455.100	APBD	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100 Orang	46.455.100	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	4 Kali	46.455.100	APBD	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	4 Kali	46.455.100	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikembangkan	5 Lembaga	-	APBD	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikembangkan	5 Lembaga	-	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang terlatih	5 Lembaga	-	APBD	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang terlatih	5 Lembaga	-	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisa dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Menyajikan data terpilah gender dan anak sebagai bahan dalam pengambilan keputusan	1 Dokumen	35.179.000	APBD	Pengumpulan, Pengolahan Analisa dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Menyajikan data terpilah gender dan anak sebagai bahan dalam pengambilan keputusan	1 Dokumen	35.179.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Terpilah Gender dan Anak yang disediakan	1 Dokumen	35.179.000	APBD	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Terpilah Gender dan Anak yang disediakan	1 Dokumen	35.179.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Ketersediaan Lembaga Pemenuhan Hak Anak	45 Lembaga	50.000.000	APBD	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Ketersediaan Lembaga Pemenuhan Hak Anak	45 Lembaga	50.000.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak yang ditingkatkan	45 Lembaga	50.000.000	APBD	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak yang ditingkatkan	45 Lembaga	50.000.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Lembaga Layanan Kualitas Hidup Anak	12 Kali	39.821.000	APBD	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Lembaga Layanan Kualitas Hidup Anak	12 Kali	39.821.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dilaksanakan	12 Kali	39.821.000	APBD	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dilaksanakan	12 Kali	39.821.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
								6.092.281.250					6.092.281.250	

## **II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam bentuk berita acara musrenbang kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program dan kegiatan/sub kegiatan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing perangkat daerah yang ada di tingkat Kecamatan
4. Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin pada tahun 2022 tidak terdapat usulan dari kecamatan yang mengarahkan usulannya ke dinas sosial,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin.



### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN

### III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain Program Nasional yang akan dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2022 oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia serta Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, provinsi sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar  
Program Nasional : **Percepatan pengurangan kemiskinan**  
Program Provinsi : Program Perlindungan dan jaminan Sosial  
Program OPD : Program Perlindungan dan jaminan Sosial
2. Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar  
Program Nasional : **Mendorong Pembangunan Gender**  
Program Provinsi : - Program Perlindungan Perempuan  
- Program Pemenuhan Hak Anak  
Program OPD : - Program Perlindungan Perempuan  
- Program Pemenuhan Hak Anak

### **III.2. Tujuan dan sasaran Renja dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin**

Penetapan tujuan dan sasaran renja dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten merangin didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada Perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan strategis yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

#### **a. Tujuan**

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan Jumlah PMKS
2. Meningkatkan Peran Perempuan, Anak serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

#### **b. Sasaran**

Sementara itu sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )
2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Meningkatnya Pembangunan Perempuan
4. Dan ditata kelola Pemerintahan sasarannya adalah meningkatnya kualitas SAKIP DINSOSPPPA Kabupaten Merangin.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial**  
**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Merangin**  
**Tahun 2019-2023.**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Sat	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran
					Tahun 2020	Tahun 2022
1.	Menurunkan Jumlah PMKS		<b>Persentase Penurunan PMKS</b>	<b>%</b>	<b>5,30</b>	<b>5,65</b>
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )	Persentase PMKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	%	42,27	42,62
2.	Meningkatkan peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak		<b>Indek Pembangunan Gender ( IPG )</b>	<b>%</b>	<b>87,98</b>	<b>88,37</b>
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	4,0	3,0
			IPG Perempuan	%	0	54,51

### III.3. Program dan Kegiatan

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan kegiatan/sub kegiatan rutin setiap tahun yang merupakan urusan penunjang pemerintah daerah.
2. Program dan kegiatan yang bersifat mendukung prioritas Nasional sehingga hal tersebut dapat terlaksana oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dalam hal mendukung pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan provinsi jambi.
3. Program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas masing – masing urusan sosial maupun pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berupa penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

B. Urusan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin, sebagai salah satu OPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan 2 (dua) urusan :

- 1) urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial
- 2) urusan wajib non pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Telah menyusun tahapan-tahapan implementasi perencanaan melalui program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan tujuan, sasaran dalam visi dan misi organisasi kepala daerah.

Bentuk indikasi pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, maka tahapan-tahapan dalam menyusun perencanaan program dimulai dari menentukan tujuan dan sasaran, strategi, indikator keberhasilan, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dibutuhkan. Adapun program-program Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Kabupaten Merangin pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 10 Program dan 22 Kegiatan Dari 43 Sub Kegiatan dengan total dana sebesar Rp. 6.092.281.250, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	URAIAN PROGRAM
A.	PROGRAM UTAMA	
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Program Rehabilitasi Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis yang berkembang keberpungsiannya. Proram ini Juga Merupakan Program Pendukung Prioritas Nasional, Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan dan Pencapaian NSPK dan SPM.
2.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Program Penanganan Bencana, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Korban Bencana dan Kelompok Rentan yang meningkat kemampuan bertahan hidupnya. Proram ini Juga Merupakan Program Pendukung Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Proram in Juga Merupakan Program Pendukung Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Pencapaian SDGs dan Pencapaian NSPK dan SPM Bidang Sosial.
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Keluarga Miskin dan Rentan

			<p>yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan kebutuhan dasar.</p> <p>Proram ini Juga Merupakan Program Pendukung Prioritas Nasional, Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan dan Pencapaian NSPK dan SPM.</p>
	4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	<p>Program Pemberdayaan Sosial, kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Sumber Dana Bantuan Sosial Masyarakat yang dikelola Untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Persentase PSKS yang Berperan Aktiv dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Persentase warga KAT yang Meningkatkan Kualitas Hidup.</p> <p>Proram ini Juga Merupakan Program Pendukung Prioritas Nasional, Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan dan Pencapaian NSPK dan SPM.</p>
	5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	<p>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, kinerja yang ingin dicapai adalah Taman Makam Pahlawan yang dikelola.</p> <p>Proram ini Juga Merupakan Program Pendukung Prioritas Nasional, Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.</p>
	6.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<p>Program Perlindungan Perempuan , Kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang tertangani.</p>

			Proram ini Juga Merupakan Program Pendukung Prioritas Nasional, Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Pencapaian SDGs
	7.	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG. Proram ini Juga Merupakan Program Pendukung Prioritas Nasional, Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Pencapaian SDGs
	8.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Kinerja yang harus dicapai Jumlah Dokumen data terpilah gender dan anak yang disediakan. Proram ini Juga Merupakan Program Pendukung Prioritas Nasional, Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Pencapaian SDGs
	9.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Kinerja yang Harus dicapai adalah Kabupaten/Kota Layak Anak. Proram ini Juga Merupakan Program Pendukung Prioritas Nasional, Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Pencapaian SDGs.
	B.	URUSAN PENUNJANG	
	1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- C. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah : Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan pada tahun mendatang.
- D. Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel 3.2 sebagai berikut :



**Tabel 3.2  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023  
KABUPATEN MERANGIN**

KODE	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Cakupan Rerang	Prakiraan Madya Rencana Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab				
			Lokas	Target Capaian Kinerja	Ketuntasan Dana / Realisasi	Survei Dana		Target Capaian Kinerja	Ketuntasan Dana / Realisasi					
			4	5	6	7	8	9	10	11				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		Kab. Merangin							Dinas SOSKPA Kab. Merangin				
1	06	01	2,06	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat keluar perangkat daerah	Kab. Merangin	170 Surat	1.202.500	APBD		180 Surat	1.160.625	Dinas SOSKPA Kab. Merangin
1	06	01	2,06	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Merangin	12 Bulan	78.815.900	APBD		12 Bulan	60.056.695	Dinas SOSKPA Kab. Merangin
1	06	01	2,06	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makan dan minum yang disediakan	Kab. Merangin	12 Bulan	17.514.000	APBD		12 Bulan	17.514.000	Dinas SOSKPA Kab. Merangin
1	06	01	2,06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat/keengkapan listrik dan elektronik perangkat daerah yang disediakan	Kab. Merangin	16 Jenis	10.000.000	APBD		16 Jenis	10.000.000	Dinas SOSKPA Kab. Merangin
1	06	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Merangin	0 Unit	-	APBD		0 Unit	-	Dinas SOSKPA Kab. Merangin
1	06	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik yang disediakan	Kab. Merangin	12 Bulan	70.000.000	APBD		12 Bulan	70.000.000	Dinas SOSKPA Kab. Merangin
1	06	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan perangkat daerah yang disediakan	Kab. Merangin	16 Eks	27.200.000	APBD		16 Eks	27.200.000	Dinas SOSKPA Kab. Merangin
1	06	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kab. Merangin	31 Media Massa	50.000.000	APBD		31 Media Massa	50.000.000	Dinas SOSKPA Kab. Merangin
1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi perjalanan dinas keluar daerah	Kab. Merangin	83 Kali	321.513.300	APBD		84 Kali	317.528.905	Dinas SOSKPA Kab. Merangin
1	06	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kendaraan dinas/operasional perangkat daerah yang diadakan	Kab. Merangin	2 Unit	-	APBD		2 Unit	-	Dinas SOSKPA Kab. Merangin
1	06	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Mebel perangkat Daerah yang diadakan	Kab. Merangin	17 Unit	-	APBD		19 Unit	-	Dinas SOSKPA Kab. Merangin

1	06	01	2,07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Peralatan gedung kantor yang disediakan	Kab. Merangin	10 Unit		APBD		15 Unit		
1	06	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan bangunan gedung kantor lainnya yang dibangun	Kab. Merangin	1 Unit		APBD		1 Unit		
1	06	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang disediakan	Kab. Merangin	8 Unit	16.000.000	APBD		10 Unit	16.800.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	Kab. Merangin	19 Unit	179.989.500	APBD		21 Unit	186.988.975	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Ruang Gedung Kantor yang dipelihara	Kab. Merangin	1 Unit	40.000.000	APBD		1 Unit	40.000.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Merangin	17 Unit	19.985.000	APBD		19 Unit	20.984.250	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga serta Atributnya yang disediakan	Kab. Merangin	92 Stel	63.625.000	APBD		126 Stel	100.000.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN yang mengikuti Bimtek	Kab. Merangin	3 Orang	17.445.000	APBD		16 Orang	16.317.250	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Merangin	12 Bulan	3.761.081.250	APBD		12 Bulan	3.940.135.313	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi Keuangan Dinsosppa yang disediakan	Kab. Merangin	12 Bulan	148.320.000	APBD		12 bulan	155.736.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Merangin	1 Dok	7.568.000	APBD		1 Dok	7.996.400	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,02	08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen pelaporan keuangan semesteran PD	Kab. Merangin	1 Dok	7.568.100	APBD		1 Dok	7.996.505	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	- Dokumen renstra - Dokumen renja	Kab. Merangin	5 Dok	20.000.000	APBD		5 Dok	21.600.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen perencanaan RKA dan RKAP	Kab. Merangin	2 Dok	8.325.000	APBD		2 Dok	8.741.250	Dinas SOSPPA Kab. Merangin

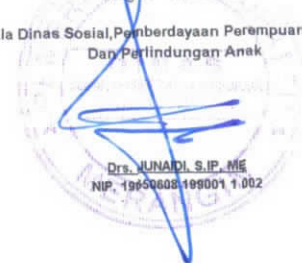
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dokumen DPA dan DPA Perubahan	Kab. Merangin	2 Dok	8.325.000	APBD		2 Dok	8.741.200	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RO (LKJ) Laporan Tahunan, IKU & PK, dan Standar Penilaian Sistem	Kab. Merangin	5 Dok	59.252.500	APBD		5 Dok	52.215.125	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	penataan aset SKPD Dinas SOSPPPA	Kab. Merangin	1 Dok	19.363.000	APBD		1 Dok	20.331.150	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial	Terpenuhiya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Pantii	Kab. Merangin	132 Orang	131.862.000	APBD		132 Orang	138.455.100	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemakanan	Kab. Merangin	132 Orang	31.274.500	APBD		132 Orang	32.636.225	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Sandang	Kab. Merangin	132 Orang	30.163.000	APBD		132 Orang	31.671.150	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Sentu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Alat Sentu	Kab. Merangin	60 Orang	41.060.500	APBD		60 orang	42.111.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Bimbingan Sosial	Kab. Merangin	132 Orang	29.364.000	APBD		132 Orang	30.111.200	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Pantii Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Kab. Merangin	140 Orang	172.851.000	APBD		140 Orang	181.493.550	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.02	14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kamibran dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Kab. Merangin	140 Orang	172.851.000	APBD		140 Orang	181.493.550	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhiya kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan sosial daerah Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	500 Orang	76.967.300	APBD		500 Orang	80.815.665	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Alam yang mendapatkan makanan	Kab. Merangin	500 Orang	43.262.500	APBD		500 Orang	45.425.625	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana Alam yang mendapatkan Sandang		500 Orang	-	APBD		500 Orang	-	
1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsai	Jumlah Korban Bencana Alam yang mendapatkan tempat penampungan		500 Orang	33.704.800	APBD		500 Orang	35.390.640	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Raker Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas data base kemiskinan		1 Dok	200.846.800	APBD		1 Dok	210.889.100	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	05	2.02	01	Pandataan Raker Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kemiskinan yang terupdate setiap tahun		1 Dok	147.632.700	APBD		1 Dok	152.021.100	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Frekuensi fasilitas masyarakat miskin dalam mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga		1 Kali	53.214.100	APBD		1 Kali	55.874.895	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin

1	06	02	2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial secara tepat	6 Penyelenggara	32.347.500	APBD	8 Penyelenggara	33.964.875	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Grotis Bahadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Penyelenggara UGB dan PUB yang berpartisipasi dalam penanganan PKKS	6 Penyelenggara	32.347.500	APBD	8 Penyelenggara	33.964.875	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	4 PSKS	66.374.500	APBD	5 PSKS	69.903.225	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekursi Pelatihan PSM	1 Kali		APBD	1 Kali		Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekursi Pelatihan TKSK	1 kali	16.435.500	APBD	1 Kali	17.571.275	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekursi Pelatihan PSKS Kelembagaan Masyarakat	3 Kali	50.139.000	APBD	1 Kali	51.641.250	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Meningkatkan Kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar	1 Kelompok	57.442.000	APBD	1 Kelompok	60.314.100	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Fortifikasi Sosial KAT	Jumlah KAT yang mendapatkan bantuan sosial	1 Kelompok	57.442.000	APBD	1 Kelompok	60.314.100	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin

1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN PAHLAWAN	TAMAN MAKAM	TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG TERLOLA	1 Lokasi	36.442.000	APBD	2 Lokasi	38.264.100	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutim Taman Makam Pahlawan Patriot Bangko		1 Lokasi	36.442.000	APBD	1 Lokasi	38.264.100	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	07	2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Taman Makam Pahlawan yang dipelihara		1 Lokasi	36.442.000	APBD	1 Lokasi	38.264.100	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSEPSI KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK YANG TERDAMPAI		100%	140.000.000	APBD	100%	147.000.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan Pengembangan Lembaga Perlindungan Perempuan yang ditingkatkan		21 Lembaga	140.000.000	APBD	26 Lembaga	147.000.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03	2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Layanan Bagi Korban Kekerasan yang disediakan		1 Unit	140.000.000	APBD	1 Unit	147.000.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03	2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Kabupaten/Kota	Jumlah TGT yang dilaksanakan		2 Kali	-	APBD	2 Kali	-	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03	2.03 03	Penyediaan Bantuan Khusus bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus yang mendapatkan layanan		60 Orang	-	APBD	60 Orang	-	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03	2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang ditingkatkan		5 Lembaga	-	APBD	5 Lembaga	-	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02		PROGRAM PENGARUS-UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE PERINGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PUG		74,07 %	90.453.100	APBD	100 %	101.777.855	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02	2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kelembagaan PUG		45 PUG	50.000.000	APBD	54 PUG	52.500.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02	2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Rumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah kelembagaan PUG yang aktif		45 PUG	50.000.000	APBD	54 PUG	52.500.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		100 Orang	46.455.100	APBD	100 Orang	48.777.855	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02	2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan		4 Kali	46.455.100	APBD	4 Kali	48.777.855	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikembangkan	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikembangkan		5 Lembaga	-	APBD	6 Lembaga	-	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02	2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Pemberdayaan Perempuan yang terlatih		5 Lembaga	-	APBD	6 Lembaga	-	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
3	00	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	JUMLAH PERUMAHAN DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK YANG DITANGGUNG		1 Dokumen	35.179.000	APBD		36.937.950	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menyajikan data terpilah gender dan anak sebagai bahan dalam pengambilan keputusan		1 Dokumen	35.179.000	APBD		36.937.950	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	05	2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Terpilah Gender dan Anak yang disediakan		1 Dokumen	35.179.000	APBD		36.937.950	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK		NINDYA	50.000.000	APBD	UTAMA	54.311.050	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	06	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Ketersediaan Lembaga Pemenuhan Hak Anak		45 Lembaga	50.000.000	APBD	50 Lembaga	52.500.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	06	2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak yang ditingkatkan		45 Lembaga	50.000.000	APBD	50 Lembaga	52.500.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan Lembaga Layanan Kualitas Hidup Anak		12 Kali	39.821.000	APBD	14 Kali	41.812.050	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	06	2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dilaksanakan		12 Kali	39.821.000	APBD	14 Kali	41.812.050	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
								6.092.281.250			6.212.211.548	

Bangka, Maret 2021

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak



Drs. JUNADI, S.IP, M.E  
NIP. 196506081990011002

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD**

**IV.1 Indikator Kinerja**

Adapun indikator kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada RPJMD Perubahan Kabupaten Merangin tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) yang terpenuhi kebutuhan dasar dengan target pada tahun 2022 sebanyak 42,62%.
2. Persentase Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target pada tahun 2022 sebanyak 3,0 %.
3. Indeks Pemberdayaan Gender ( IDG ) dengan target pada tahun 2021 sebanyak 54,61%.

**IV.2 Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif, Sumber Dana**

Secara rinci lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif serta sumber dana kegiatan pada tahun 2022 tampak pada tabel IV.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas daerah Tahun 2023 Kabupaten Merangin sebagaimana terlampir

**Tabel 4.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**  
**KABUPATEN MERANGIN**

KODE	Urusan / Bidang / Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		SKPD Penanggung Jawab				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif					
											1/2/3			
4	5	6	7	8	9	10	11							
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		Kab. Merangin							Dinas SOSPPA Kab. Merangin				
1	06	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat keluar perangkat daerah	Kab. Merangin	170 Surat	1.202.500	APBD		180 Surat	1.202.625	Dinas SOSPPA kab. Merangin
1	06	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Merangin	12 Bulan	78.615.900	APBD		12 Bulan	80.456.695	Dinas SOSPPA kab. Merangin
					Penyediaan Jasa Penerjemah Umum Kantor	Penerjemah Umum yang disediakan		12 Bulan	16.914.000	APBD		12 Bulan	17.114.000	
1	06	01	2,06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat/keengkapan listrik dan elektronik perangkat daerah yang disediakan	Kab. Merangin	16 Jenis	10.000.000	APBD		18 Jenis	10.500.000	Dinas SOSPPA kab. Merangin
1	06	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kab. Merangin	0 Unit	-	APBD		0 Unit	-	Dinas SOSPPA kab. Merangin
1	06	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik yang disediakan	Kab. Merangin	12 Bulan	70.000.000	APBD		12 Bulan	72.500.000	Dinas SOSPPA kab. Merangin
1	06	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan perangkat daerah yang disediakan	Kab. Merangin	16 Eks	27.200.000	APBD		18 Eks	28.500.000	Dinas SOSPPA kab. Merangin
1	06	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kab. Merangin	31 Media Massa	50.000.000	APBD		31 Media Massa	50.400.000	Dinas SOSPPA kab. Merangin
1	06	01	2,36	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi perjalanan dinas keluar ke luar daerah	Kab. Merangin	83 Kali	321.513.300	APBD		84 Kali	337.588.905	Dinas SOSPPA kab. Merangin
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Perjalanan	Kendaraan dinas/operasional perangkat daerah yang diadakan	Kab. Merangin	2 Unit	-	APBD		2 Unit	-	Dinas SOSPPA kab. Merangin
					Pengadaan Mebel	Mebeler perangkat Daerah yang diadakan	Kab. Merangin	17 Unit	-	APBD		19 Unit	-	Dinas SOSPPA kab. Merangin

1	06	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Peralatan gedung kantor yang disediakan	Kab. Merangin	10 Unit		APBD		15 Unit		
1	06	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan bangunan gedung kantor lainnya yang dibangun	Kab. Merangin	1 Unit		APBD		1 Unit		
1	06	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang disediakan	Kab. Merangin	8 Unit	16.000.000	APBD		10 Unit	15.800.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	Kab. Merangin	19 Unit	179.989.900	APBD		21 Unit	188.988.975	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Ruang Gedung Kantor yang dipelihara	Kab. Merangin	1 Unit	40.000.000	APBD		1 Unit	40.000.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Merangin	17 Unit	19.985.000	APBD		19 Unit	20.984.250	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,05	02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Keengkapannya	Pakaian Dinas dan Pakaian Olahraga serta Atributnya yang disediakan	Kab. Merangin	92 Stel	63.625.000	APBD		126 Stel	66.406.150	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN yang mengikuti Bimtek	Kab. Merangin	3 Orang	17.445.000	APBD		16 Orang	18.317.250	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Merangin	12 Bulan	3.761.081.250	APBD		12 Bulan	3.949.135.313	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi Keuangan Dinsosppa yang disediakan	Kab. Merangin	12 Bulan	148.320.000	APBD		12 bulan	155.796.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Merangin	1 Dok	7.568.000	APBD		1 Dok	7.946.400	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,02	08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen pelaporan keuangan semesteran PD	Kab. Merangin	1 Dok	7.568.100	APBD		1 Dok	7.946.505	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	- Dokumen renstra - Dokumen renja	Kab. Merangin	5 Dok	20.000.000	APBD		5 Dok	22.000.000	Dinas SOSPPA Kab. Merangin
1	06	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen perencanaan RKA dan RKAP	Kab. Merangin	2 Dok	8.325.000	APBD		2 Dok	8.741.250	Dinas SOSPPA Kab. Merangin



1	06	01	2.51	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dokumen DPA dan DPA Perubahan	Kab. Merangin	2 Dok	8.325.000	APBD		2 Dok	8.741.250	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.51	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD (LKJ, laporan Tahunan, IKU & PK, dan Standar Penilaian Sistem	Kab. Merangin	5 Dok	59.252.500	APBD		5 Dok	62.215.125	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	01	2.53	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	penataan aset SKPD Dinas SOSPPPA	Kab. Merangin	1 Dok	19.363.000	APBD		1 Dok	20.331.150	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.51		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Kab. Merangin	132 Orang	131.862.000	APBD		132 Orang	138.455.100	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	6	4	2.51	1	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemakanan	Kab. Merangin	132 Orang	31.274.500	APBD		132 Orang	32.638.225	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	6	4	2.51	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Sandang	Kab. Merangin	132 Orang	20.162.000	APBD		132 Orang	21.124.250	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	6	4	2.51	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Alat Bantu	Kab. Merangin	60 Orang	41.060.500	APBD		60 orang	42.111.250	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.51	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Bimbingan Sosial	Kab. Merangin	132 Orang	29.364.000	APBD		132 Orang	30.638.250	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.52		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Kab. Merangin	140 Orang	172.851.000			140 Orang	181.493.550	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	04	2.02	14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kamitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Kab. Merangin	140 Orang	172.851.000	APBD		140 Orang	181.493.550	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	06	2.51		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan sosial daerah Kabupaten/Kota	Kab. Merangin	500 Orang	76.967.300	APBD		500 Orang	80.815.665	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	6	6	2.51	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana Alam yang mendapatkan makanan	Kab. Merangin	500 Orang	43.262.500	APBD		500 Orang	45.425.625	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	6	6	2.51	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana Alam yang mendapatkan Sandang		500 Orang	-	APBD		500 Orang	-	
1	6	6	2.51	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Korban Bencana Alam yang mendapatkan tempat penampungan		500 Orang	33.704.800	APBD		500 Orang	35.390.040	
1	06	05	2.52		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas data base kemiskinan		1 Dok	200.846.800	APBD		1 Dok	210.897.100	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	05	2.52	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kemiskinan yang terupdate setiap tahun		1 Dok	147.632.700	APBD		1 Dok	155.014.335	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	05	2.52	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Frekuensi fasilitasi masyarakat miskin dalam mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga		1 Kali	53.214.100	APBD		1 Kali	55.874.635	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin

1	06	02	2.52	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial secara tepat		6 Penyelenggara	32.347.500	APBD		8 Penyelenggara	33.964.875	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.52	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penarbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Penyelenggara UGB dan PUB yang berpartisipasi dalam penanganannya		6 Penyelenggara	32.347.500	APBD		8 Penyelenggara	33.964.875	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.53	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		4 PSKS	66.574.500	APBD		5 PSKS	69.903.225	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.53	01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	Frekuensi Pelatihan PSM		1 Kali		APBD		1 Kali		Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.53	02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota	Frekuensi Pelatihan TIKSK		1 Kali	16.435.500	APBD		1 Kali	17.257.275	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.53	04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kalaupun Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	Frekuensi Pelatihan PSKS Kalaupun Masyarakat		3 Kali	50.139.000	APBD		1 Kali	52.645.950	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.51	Pembudayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Meningkatkan Kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar		1 Kelompok	57.442.000	APBD		1 Kelompok	60.314.100	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
1	06	02	2.51	01 Fasilitas Pendukung Sosial KAT	Jumlah KAT yang mendapatkan bantuan		1 Kelompok	57.442.000	APBD		1 Kelompok	60.314.100	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin

1	06	07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM BAHAWAN	TAMAN MAKAM BAHAWAN YANG DITELOLA	1 Lokasi	35.442.000	APBD		1 Lokasi	35.442.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutim Taman Makam Pahlawan Patriot Bangko	1 Lokasi	36.442.000	APBD		1 Lokasi	36.254.100	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 Lokasi	36.442.000	APBD		1 Lokasi	36.254.100	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK YANG TERTANGANI	100%	140.000.000	APBD		100%	140.000.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
2	08	03	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Perlindungan Perempuan yang ditingkatkan	21 Lembaga	140.000.000	APBD		26 Lembaga	147.000.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
2	08	03	2.03	01	Aktivasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Layanan Bagi Korban Kekerasan yang disediakan	1 Unit	140.000.000	APBD		1 Unit	147.000.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Kabupaten/Kota	Jumlah TOT yang dilaksanakan	2 Kali	-	APBD		2 Kali	-	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kabin Khusus bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus yang mendapatkan layanan	60 Orang	-	APBD		60 Orang	-	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang ditingkatkan	5 Lembaga	-	APBD		5 Lembaga	-	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE PERINGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PUG	74,07%	50.000.000	APBD		100%	101.277.855	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
2	08	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kelembagaan PUG	45 PUG	50.000.000	APBD		54 PUG	52.500.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah kelembagaan PUG yang aktif	45 PUG	50.000.000	APBD		54 PUG	52.500.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100 Orang	46.455.100	APBD		100 Orang	48.777.855	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	4 Kali	46.455.100	APBD		4 Kali	48.777.855	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dikembangkan	5 Lembaga	-	APBD		6 Lembaga	-	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Pemberdayaan Perempuan yang terlatih	5 Lembaga	-	APBD		6 Lembaga	-	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	JUMLAH DOKUMEN DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK YANG DISEDIAKAN	1 Dokumen	35.179.000	APBD			36.937.950	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Menyiapkan data terpilah gender dan anak sebagai bahan dalam pengambilan keputusan	1 Dokumen	35.179.000	APBD			36.937.950	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Terpilah Gender dan Anak yang disediakan	1 Dokumen	35.179.000	APBD			36.937.950	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	100%	50.000.000	APBD		100%	52.500.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
2	08	06	2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Ketersediaan Lembaga Pemenuhan Hak Anak	45 Lembaga	50.000.000	APBD		50 Lembaga	52.500.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak yang ditingkatkan	45 Lembaga	50.000.000	APBD		50 Lembaga	52.500.000	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Lembaga Layanan Kualitas Hidup Anak	12 Kali	39.821.000	APBD		14 Kali	41.812.050	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin	
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dilaksanakan	12 Kali	39.821.000	APBD		14 Kali	41.812.050	Dinas SOSPPPA Kab. Merangin
							6.092.281.250					6.212.211.548	

Bangka, Maret 2021

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak

Drs. JUNAIADI, S.IP., ME  
NIP. 19650608 199001 1 002

## **BAB V**

### **PENUTUP**

a. Rekomendasi Pelaksanaan

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui usulan tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.
- c. Rencana tindak lanjut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin pada tahun 2021 mendatang akan menetapkan 10 Program dan 22 Kegiatan Dari 43 Sub Kegiatan . Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Merangin tahun 2022 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan.

Demikian Rancangan rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tahun 2022 disusun, *diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rancangan rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah mencakup semua program pembangunan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.*

Bangko, Maret 2021

**KEPALA DINAS  
SOSPPPA KAB. MERANGIN**



**Drs. JUNAIDI, S.IP, ME  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650608 199001 1 002**